

LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PELAKSANAAN SWAKELOLA TIPE III PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KABUPATEN KAPUAS

Oleh:

Ir. Ryco Prawira Purba, S.T., M.T

NUPTK. 9034773674130333

Ir. Hendra Putra Jaya, S.T., M.T

NIDN. 1110128201

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN
2026

HALAMAN PENGESAHAN

PENGABDIAN MASYARAKAT DOSEN INTERNAL

Judul Pengabdian : Pelaksanaan Swakelola Tipe III Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Kapuas
Tema Pengabdian : Pembangunan Infrastruktur
Nama Ketua : Ir. Ryco Prawira Purba, ST., MT
NUPTK : 9034773674130333
Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar
Program Studi : Teknik Lingkungan
Nomor HP : 085249971129
Alamat email : ryco.purba@gmail.com
Nama Anggota 1 : Ir. Hendra Putra Jaya, ST., MT
Program Studi : Teknik Sipil
Nama Mahasiswa : 1. Jelfrison Rian Sitinjak NIM. 22.51.126752
Yang Terlibat : 2. Beta Prasetya.B NIM. 24.51.031096
Biaya Penelitian : Rp. 5.000.000,- (Terbilang: Lima Juta rupiah)

Paraf Kaprodi Teknik Lingkungan,  <u>Ir. Rudy Yoga Lesmana, ST., M.Si</u> NIK. 16.0502.021	1. Pengabdian diusulkan Sesuai dengan Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Penelitian yang diusulkan sesuai dengan bidang ilmu PS 3. Penelitian ini diusulkan melibatkan mahasiswa 4. Usulan Pengabdian telah dibukukan Prodi
---	--

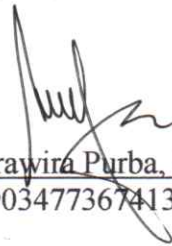
Palangka Raya, 12 Mei 2026

Mengetahui,
Dekan,



Ir. Norseta Aji Saputra, ST., MT
NIK. 15.0501.047

Ketua Peneliti,



Ir. Ryco Prawira Purba, ST., MT
NUPTK. 9034773674130333



Menyetujui
Kepala DRPM UM Palangkaraya,

Dr. Apt. Mohammad Rizki Fadhil Pratama, S.Farm., M.Si
NIK. 15.0602.042

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Pengabdian

Pelaksanaan Swakelola Tipe III Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Kapuas

2. Ketua Pengusul

Nama : Ir. Ryco Prawira Purba, S.T., M.T

NUPTK : 9034773674130333

Bidang Keahlian : Manajemen Transportasi

Alokasi Waktu (Jam/Minggu) : 12 Minggu

3. Objek

Objek kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu Sekolah SMA (Sekolah Menengah Atas) di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pendampingan pembangunan sekolah

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan Februari 2026

Berakhir : Bulan Mei 2026

5. Lokasi Pengabdian

Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

6. Intansi Lain yang terlibat

- Direktorat Sekolah Menengah Atas (SMA)
- Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

7. Target/Capaian

- Laporan Pengabdian Masyarakat
- Publikasi Kegiatan dimedia social
- Terlaksananya pembangunan sekolah hingga selesai

8. Kontribusi Mendasar Pada Institusi Maupun Persyarikatan

- Meningkatkan peran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dalam pembangunan daerah Kabupaten, Kota, dan Provinsi Kalimantan Tengah
- Memperkuat Citra Intitusi sebagai kampus dalam pembangunan daerah kearifan local
- Mendorong terbentuknya budaya akademik yang aktif dalam pembimbingan di kegiatan pembangunan daerah

- Mendukung implementasi nilai-nilai Muhammadiyah dalam kepedulian pembangunan terhadap lingkup daerah

RINGKASAN

Pemerintah (melalui koordinasi pusat dan daerah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah) meluncurkan program revitalisasi masif untuk hampir 100 sekolah di Kalteng. Program ini tidak hanya berfokus pada perbaikan atau menghadirkan bangunan fisik baru, tetapi juga sebagai bentuk dukungan nyata untuk memperkuat semangat dan kapasitas sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas. Pemerintah memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan untuk memilih pola pelaksanaan, baik melalui pihak ketiga (kontraktor) maupun sistem swakelola.

Swakelola Tipe III dipilih sebagai platform legal kolaborasi di mana perencanaan dan pengawasan dilakukan oleh instansi penanggung jawab anggaran (Kementerian/Dinas terkait), sementara pelaksanaannya diserahkan kepada Sekolah masing-masing dan sekolah memilih tenaga pelaksanaannya sendiri dengan standar yang berkompeten di bidangnya. Dalam konteks proyek pendidikan, pelaksana Swakelola Tipe III (seperti akademisi atau asosiasi profesi) bertugas melakukan pendampingan program, pemantauan konstruksi, reviu, dan pengadaan perabot, hingga memberikan rekomendasi teknis atas kendala di lapangan agar bangunan memenuhi standar teknis.

Melalui keterlibatan aktif kelompok masyarakat/profesi dalam Swakelola Tipe III, hasil akhir revitalisasi sekolah di Kalimantan Tengah diharapkan dapat tercapai secara maksimal, tepat mutu, tepat anggaran, dan secara langsung meningkatkan indeks pelayanan pendidikan di daerah guna melahirkan SDM unggul.

Kata Kunci : Swakelola, Pendidikan, Sekolah

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
PENGESAHAN.....	ii
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM.....	iii
RINGKASAN	vi
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Lingkup Pekerjaan	2
1.4 Waktu Perencanaan	3
1.5 Lokasi Pekerjaan	3
BAB II GAMBARAN UMUM EKSISTING	
2.1. Gambaran umum Kegiatan	4
2.2. Gambaran Lokasi Kegiatan.....	4
2.2.1 Letak Geografis.....	4
2.2.2 Penduduk	5
2.2.3 Tenaga Kerja	6
2.2.4 Produk Domestik Regional Bruto	8
2.3. Capaian Lokasi Kegiatan	8
2.3.1 Jalur 1 (satu)	9
BAB III METODOLOGI PELAKSANAAN	
3.1. Pendekatan Umum	11
3.1.1. Pekerjaan Persiapan	11
3.1.2. Survey Pendahuluan.....	11
3.2. Pola Pendampingan Program Revitalisasi Sekolah	12
3.3. Pengendalian Mutu Hasil Pekerjaan	14
3.4. Monitoring dan Evaluasi	14
BAB IV PELAKSANAAN KERJA	
4.1. Tenaga Pendamping.....	15
4.2. Jadwal Penugasan Personil	19
4.3. Pelaksanaan Pendampingan	20
BAB V REKOMENDASI DAN SARAN	
5.1. Rekomendasi dan Saran	21
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai program strategis, salah satunya adalah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Program Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Sekolah Menengah Atas dalam meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan guna menunjang proses belajar mengajar yang lebih baik.

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata, Pemerintah menetapkan program prioritas nasional Revitalisasi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan. Program tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan Asta Cita ke-4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), penguatan pendidikan berkualitas, aksesibilitas, teknologi, serta pembangunan karakter generasi muda yang inovatif dan adaptif. Sebagai langkah mendukung program terkait, Direktorat Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah bermaksud melaksanakan program bantuan pemerintah yaitu program revitalisasi satuan Pendidikan dalam bentuk rehabilitasi dan pembangunan prasarana satuan pendidikan termasuk termasuk sarana (perabot).

Khususnya di wilayah Kalimantan Tengah, tantangan revitalisasi infrastruktur pendidikan menengah atas menjadi sangat relevan. Berdasarkan observasi dan data dari berbagai instansi terkait, banyak sekolah menengah atas di Kalimantan Tengah masih menghadapi kondisi infrastruktur yang tidak memadai. Di sejumlah daerah, ruang kelas masih dalam kondisi rusak sedang hingga berat, sarana sanitasi terbatas, laboratorium dan perpustakaan belum memenuhi standar, serta kurangnya perabotan penunjang pembelajaran. Hal ini tentu berdampak langsung terhadap kenyamanan, keamanan, dan

efektivitas proses belajar-mengajar.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan program ini berjalan efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan dukungan dan pengawasan yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai mitra pelaksana dalam skema swakelola. Perguruan tinggi, sebagai institusi yang memiliki kompetensi teknis, akademik, dan manajerial, dipercaya untuk mendampingi Direktorat Sekolah Menengah Atas dalam melakukan persiapan, pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan revitalisasi di satuan pendidikan. Peran ini mencerminkan sinergi antara dunia pendidikan tinggi dan pendidikan menengah dalam mewujudkan tata kelola program yang berkualitas.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Tujuan umum dari kegiatan pendampingan merupakan implementasi tridharma perguruan tinggi, terutama dalam aspek pengabdian kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pembangunan pendidikan nasional.
- b. Tujuan pokok dari kegiatan ini adalah melaksanakan mengadakan pendampingan ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu: penyusunan rencana kerja pemantauan, reviu terhadap dokumen perencanaan satuan pendidikan, pemantauan terhadap pelaksanaan konstruksi dan pengadaan perabot, serta pemberian rekomendasi atas permasalahan yang dihadapi oleh satuan pendidikan.

1.3. LINGKUP PEKERJAAN

Secara umum, lingkup pekerjaan meliputi,

1. Penyusunan rencana kerja pemantauan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan
2. Pemantauan dan reviu hasil perencanaan yang telah dilakukan oleh Satuan Pendidikan;
3. Pemantauan dan reviu pelaksanaan konstruksi dan pengadaan perabot oleh Satuan Pendidikan;
4. Pemantauan dan reviu seluruh hasil dokumentasi, termasuk revisi dokumen perencanaan, yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan;
5. Pemberian rekomendasi terhadap masalah yang dihadapi oleh Satuan Pendidikan

6. Pelaporan dan koordinasi hasil pekerjaan pemantauan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan kepada seluruh pemangku kepentingan

Untuk waktu perencanaan ini disesuaikan dengan Kerangka Acuan Kerja yaitu 5 (*lima*) bulan

Lokasi kegiatan “Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Secara Swakelola Type III” Provinsi Kalimantan Tengah. dilaksanakan tersebar di 44 Sekolah yang tersebar di 12 (Dua Belas) Kabupaten/ Kota Di Provinsi Kalimantan Tengah.



Adapun daftar sekolah yang menjadi mitra dalam kegiatan program Revitalisasi Satuan Pendidikan Secara Swakelola Type III ini sebagaimana pada tabel 1.2 dibawah ini:

**Tabel 1.1 Data Sekolah Penerima
Program Revitalisasi Secara Swakelola**

NO	NAMA SEKOLAH	KABUPATEN	DATA BANTUAN
1	SMAN 1 BUNTOK	BARITO SELATAN	TAHAP 2
2	SMAN 3 GUNUNG BINTANG AWAI	BARITO SELATAN	TAHAP 2
3	SMAN 2 KARAU KUALA	BARITO SELATAN	TAHAP 2
4	SMAN 1 KARAU KUALA	BARITO SELATAN	TAHAP 3
5	SMAN 1 DUSUN TENGAH	BARITO TIMUR	TAHAP 2
6	SMAN 1 PATANGKEP TUTUI	BARITO TIMUR	TAHAP 2
7	SMAN 1 BENUA LIMA	BARITO TIMUR	TAHAP 2
8	SMA NEGERI 1 PAJU EPAT	BARITO TIMUR	TAHAP 2
9	SMA NEGERI 1 PAKU	BARITO TIMUR	TAHAP 3
10	SMA NEGERI 1 TAMBAN CATUR	KAPUAS	TAHAP 2
11	SMAN 3 KUALA KAPUAS	KAPUAS	TAHAP 2
12	SMA NEGERI MANTANGAI	KAPUAS	TAHAP 3
13	SMA NEGERI 1 KAPUAS MURUNG	KAPUAS	TAHAP 3
14	SMA NEGERI 1 PULAU PETAK	KAPUAS	TAHAP 3
15	SMAN 1 PULANG PISAU	PULANG PISAU	TAHAP 2
16	SMAN 1 KAHAYAN TENGAH	PULANG PISAU	TAHAP 2
17	SMAN 3 MALIKU	PULANG PISAU	TAHAP 2
18	SMAN 1 JABIREN RAYA	PULANG PISAU	TAHAP 2
19	SMA NEGERI 2 MALIKU	PULANG PISAU	TAHAP 3
20	SMAS MUHAMMADIYAH 2	PALANGKA RAYA	TAHAP 2
21	SMAN 5 PALANGKA RAYA	PALANGKA RAYA	TAHAP 2
22	SMAN 7 PALANGKARAYA	PALANGKA RAYA	TAHAP 2
23	SMA SWASTA MUHAMMADIYAH 1	PALANGKA RAYA	TAHAP 3
24	SMAN 3 SAMPIT	KOTAWARINGIN TIMUR	TAHAP 2
25	MADANIYAH SAMUDA	KOTAWARINGIN TIMUR	TAHAP 2
26	SMA NEGERI MENTAYA HILIR SELATAN	KOTAWARINGIN TIMUR	TAHAP 3
27	SMAN 1 MARIKIT	KATINGAN	TAHAP 2
28	SMAN 2 KATINGAN KUALA	KATINGAN	TAHAP 2
29	SMA SWASTA KRISTEN	KATINGAN	TAHAP 3

NO	NAMA SEKOLAH	KABUPATEN	DATA BANTUAN
	TUMBANG SAMBA		
30	SMA NEGERI 1 KATINGAN HULU	KATINGAN	TAHAP 3
31	SMA NEGERI 1 KATINGAN TENGAH	KATINGAN	TAHAP 3
32	SMAN 1 PANTAI LUNCI	SUKAMARA	TAHAP 2
33	SMAN 1 PERMATA KECUBUNG	SUKAMARA	TAHAP 2
34	SMA NEGERI 1 DELANG	LAMANDAU	TAHAP 2
35	SMA NEGERI 1 LAMANDAU	LAMANDAU	TAHAP 2
36	SMA NEGERI 1 SEMATU JAYA	LAMANDAU	TAHAP 2
37	SMA NEGERI 2 LAMANDAU	LAMANDAU	TAHAP 2
38	SMA NEGERI 1 BARITO TUHUP RAYA	MURUNG RAYA	TAHAP 2
39	SMA MUHAMMADIYAH PURUK CAHU	MURUNG RAYA	TAHAP 2
40	SMA NEGERI 1 TANAH SIANG SELATAN	MURUNG RAYA	TAHAP 2
41	SMA NEGERI 4 PURUK CAHU	MURUNG RAYA	TAHAP 2
42	SMA NEGERI 1 SUNGAI BABUAT	MURUNG RAYA	TAHAP 3
43	SMA NEGERI 1 LAHEI	BARITO UTARA	TAHAP 3
44	SMA NEGERI 1 TEWEH BARU	BARITO UTARA	TAHAP 3
45	SMA NEGERI 1 MANUHING RAYA	GUNUNG MAS	TAHAP 3

Berdasarkan data dihimpun dari Dashboard Pengelolaan Bantuan Pemerintah & Bantuan Sosial Direktorat SMA pada laman Sistem Manajemen Sarana dan Prasarana (SIMASPRAS), dapat disimpulkan bahwa program bantuan telah menjangkau 45 SMA yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dominasi pada Tahap 2 dan Tahap 3 pelaksanaan. Dibandingkan dengan data sebelumnya yang mencatat 30 sekolah, terjadi penambahan sebanyak 15 sekolah berdasarkan pembaruan data SIMASPRAS bulan Oktober. Penambahan ini menunjukkan perluasan cakupan program dan meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang memperoleh dukungan sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran. Sekolah penerima tersebar relatif merata di beberapa wilayah seperti Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Pulang Pisau, Palangka Raya, Kotawaringin Timur, Katingan, Sukamara, Lamandau, Murung Raya, Barito Utara, dan Gunung Mas, sehingga manfaat program tidak hanya terpusat pada satu daerah tertentu tetapi bersifat menyeluruh.

Namun demikian, terdapat dinamika dalam pelaksanaan bantuan, yaitu adanya satu sekolah yang mengundurkan diri, yakni SMA Negeri 1 Lahei, Kabupaten Barito Utara, dengan alasan ketidaksanggupan melaksanakan kegiatan pada sisa waktu yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa selain aspek penetapan penerima bantuan, faktor kesiapan administrasi, teknis, serta ketersediaan waktu pelaksanaan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan program. Ke depan, diperlukan pendampingan yang lebih intensif terkait manajemen waktu dan kesiapan satuan pendidikan agar seluruh sekolah penerima dapat melaksanakan bantuan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, program bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui penguatan sarana prasarana sekolah, memperkecil kesenjangan antarwilayah, serta mendukung peningkatan mutu pembelajaran di tingkat SMA di Kalimantan Tengah.

BAB II

GAMBARAN UMUM EKSISTING

2.1. GAMBARAN UMUM KEGIATAN

Data Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Secara Swakelola Type III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, sebagaimana tertuang sebagai berikut:

Program	:	Revitalisasi Satuan Pendidikan Secara Swakelola Type III
Kegiatan	:	Penyediaan Tim Pendampingan Bagi P2SP dalam Melaksanakan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Secara Swakelola dengan Perguruan Tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah (Paket 1)
Lokasi	:	Tersebar di 12 (sepuluh) Kabupaten dan Kota
Waktu Pelaksanaan	:	5 (lima) Bulan
Pelaksana	:	Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

2.2. GAMBARAN LOKASI KEGIATAN

2.2.1. Letak Geografis

Provinsi Kalimantan Tengah yang beribu kota di Palangka Raya terletak di 0° 45' Lintang Utara, 3° 30' Lintang Selatan dan 111° Bujur Timur. Luas wilayah provinsi ini menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kalimantan Tengah tahun 2009 tercatat 153,564 km². Letak Provinsi Kalimantan Tengah berbatasan dengan:

Sebelah Utara	:	Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur
Sebelah Timur	:	Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan
Sebelah Selatan	:	Laut Jawa
Sebelah Barat	:	Kalimantan Barat

Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daratan rendah, yang ketinggiannya berkisar antara 0 s/d 150 meter dari permukaan air laut. Kecuali

sebagian kecil di wilayah Utara merupakan daerah perbukitan dimana terbentang pegunungan Muller-Schawwner dengan puncak tertingginya (*Bukit raya*) mencapai 2.278 meter dari permukaan air laut.

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 14 Kabupaten/Kota dengan kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Katingan merupakan Kabupaten terluas, masing-masing 23.700 km² dan 17.800 km² atau dengan kata lain Kabupaten tersebut mencapai 27% dari seluruh wilayah Kalimantan Tengah (*Lihat Tabel 2.1*)

**Tabel 2.1. Kabupaten/Kota dan Luas Wilayahnya di
Propinsi Kalimantan Tengah**

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Ibukota
Murung Raya	23.700	Puruk Cahu
Katingan	17.800	Kasongan
Kotawaringin Timur	16.496	Sampit
Seruyan	16.404	Kuala Pembuang
Kapuas	14.999	Kuala Kapuas
Gunung Mas	10.804	Kuala Kurun
Kotawaringin Barat	10.759	Pangkalan Bun
Pulang Pisau	8.997	Pulang Pisau
Barito Selatan	8.830	Buntok
Barito Utara	8.300	Muara Teweh
Lamandau	6.414	Nanga Bulik
Barito Timur	3.834	Tamiang Layang
Sukamara	3.827	Sukamara
Palangka Raya	2.400	Palangka Raya

Sumber : BPS Kalimantan Tengah Tahun 2019

222 Penduduk

Jumlah penduduk Propinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 sesuai dengan data

BPS tercatat sebanyak 2.669.969 jiwa dengan jumlah laki-laki 1.385.705 jiwa dan perempuan 1.284.264 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan jumlah 428.895 jiwa. Kepadatan penduduknya tergolong jarang, dimana hanya sekitar 14 orang per km persegi. Berikut disajikan tabel Rumah tangga dan Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota (tabel 2,2).

Tabel 2.2. Jumlah Rumah Tanga dan Jumlah Penduduk Propinsi Kalimantan Tengah menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Populasi Penduduk (jiwa)			
	Rumah Tangga	Laki-laki	Perempuan	Total
Kotawaringin Barat	90.080	140.537	129.851	270.388
Kotawaringin Timur	80.472	222.617	206.278	428.895
Kapuas	56.623	211.973	198.473	410.446
Barito Selatan	45.242	67.113	64.027	131.140
Barito Utara	34.193	80.473	74.339	154.812
Sukamara	36.928	33.387	30.077	63.464
Lamandau	32.905	52.143	45.468	97.611
Seruyan	33.360	86.211	76.695	162.906
Katingan	30.256	84.278	77.944	162.222
Pulang Pisau	23.258	70.180	64.319	134.499
Gunung Mas	21.674	71.378	63.995	135.373
Barito Timur	26.264	58.112	55.117	113.229
Murung Raya	16.032	57.948	53.579	111.527
Palangka Raya	11.897	149.355	144.102	293.457
TOTAL	541.197	1.385.705	1.284.264	2.669.969

Sumber : registrasi Penduduk BPS Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

223 Tenaga Kerja

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Propinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021

(BPS tahun 2022), jumlah pencari kerja yang terdaftar mencerminkan tidak seimbangnya antara pencari kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia. Rata-rata setiap tahunnya tidak lebih dari 6,24% dari seluruh jumlah pencari kerja terdaftar yang mendapat pekerjaan, sisanya lebih dari 93,76% belum mendapat kesempatan. Sektor pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja di tahun 2021 adalah di sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Kehutanan. Angkanya mencapai 60,67% dari total 982.198 jiwa yang sudah bekerja (lihat tabel 2.3).

**Tabel 2.3. Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kegiatan Utama
(Jiwa), 2020-2022**

Jenis Angkatan Kerja	Penduduk Bekerja (jiwa)		
	2019	2020	2021
1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan perikanan	530.031	872.361	595.915
2. Pertambangan dan Penggalian	29.271	42.707	40.698
3. Industri Pengolahan	40.587	41.571	36.330
4. Listrik, Gas, Air	1.348	1.364	1.853
5. Bangunan	32.603	37.265	41.863
6. Perdagangan besar, eceran, Rumah Makan, Hotel	110.333	129.900	121.389
7. Angkutan Pergudangan dan Komunikasi	38.821	40.753	34.762
8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bagunan	4.888	8.184	5.261
9. Jasa kemasyarakatan	84.409	91.005	104.127
10. Lainnya	187	-	-
TOTAL	872.478	1.265.110	982.198

Sumber : Registrasi Penduduk BPS Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

224 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Seruyan atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 sebesar Rp 9.890.066,35,- atau meningkat 15,87% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 8.768.548,77. Tahun 2021 tersebut sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB, yaitu 30,40%. Kemudian disusul secara berturut oleh sektor perdagangan, restoran dan hotel sebesar 19,66%, sektor jasa sebesar 12,37%, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 19,09% serta sektor Industri Pengolahan sebesar 8,23% (lihat tabel 2.4).

Tabel 2.4. Penduduk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku dan harga konstan tahun 2019 – 2021

Tahun	PDRB (juta)	
	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
2019	8.552.209,91	6.042.812,77
2020	8.768.548,77	5.908.253,50
2021	9.890.066,35	6.033.556,38

Sumber : BPS Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

2.3. CAPAIAN LOKASI KEGIATAN

Karena terdapat penambahan sebanyak 14 sekolah pada Tahap 3, maka capaian program penyaluran bantuan menyesuaikan dengan adendum kegiatan yang telah ditetapkan. Penambahan ini berdampak pada penyesuaian target kinerja, jadwal pelaksanaan, serta strategi pemantauan di lapangan. Dalam upaya mencapai seluruh lokasi kegiatan revitalisasi, diperlukan beberapa moda transportasi, baik melalui jalur darat maupun penyeberangan sungai, mengingat sebaran sekolah yang cukup luas dan kondisi geografis yang beragam. Pelaksanaan pemantauan berubah sebelumnya 6 (enam) fasilitator menjadi 8 (delapan) fasilitator yang dibagi ke dalam 8 (delapan) jalur pemantauan, 12 (Dua Belas) Kabupaten/ Kota Di Provinsi Kalimantan Tengah. Pengaturan jalur ini bertujuan untuk memastikan pengawasan berjalan efektif, koordinasi dengan sekolah sasaran lebih optimal, serta seluruh kegiatan revitalisasi

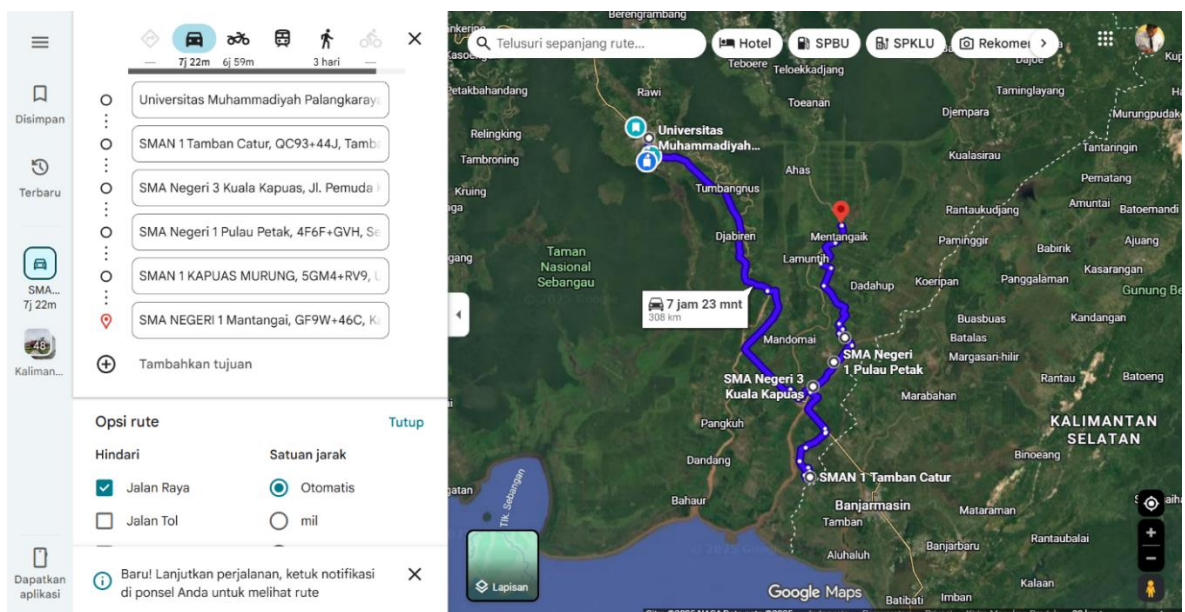
dapat terlaksana sesuai dengan addendum rencana kerja dan batas waktu yang tersedia.

2.3.1. Jalur 7 (tujuh)

Pada jalur ini terdiri dari terdiri dari 1 Kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas, adapun sekolah yang akan menjadi objek yaitu (tabel 2.5)

Tabel 2.5. Nama Sekolah Pendampingan Fasilitator 7

No	Nama Sekolah	Kabupaten	Estimasi Waktu Pekerjaan
1	SMA NEGERI 1 TAMBAN CATUR	Kab. Kapuas	4 bulan
2	SMAN 3 KUALA KAPUAS	Kab. Kapuas	4 bulan
3	SMA NEGERI MANTANGAI	Kab. Kapuas	4 bulan
4	SMA NEGERI 1 KAPUAS MURUNG	Kab. Kapuas	4 bulan
5	SMA NEGERI 1 PULAU PETAK	Kab. Kapuas	4 bulan



Gambar 2.7. Rute 7 Kampus UMPR - Kab. Kapuas

Terdapat sekolah yang hanya bisa diakses melalui jalur alternatif (jalan Sawit) yaitu

SMAN 1 KATINGAN HULU. Untuk menuju ke sekolah tersebut menggunakan jalur alternatif melalui trase jalan Perkebunan kelapa sawit dengan durasi waktu tempuh sekitar $\pm$ 3 Jam (tergantung musim penghujan) dari Tumbang Samba.

BAB III

METODOLOGI PELAKSANAAN

3.1. PENDEKATAN UMUM

Pada bagian ini, akan menguraikan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan Pendampingan.

3.1.1 Pekerjaan Persiapan

Item pekerjaan yang dilakukan dalam tahap persiapan ini adalah;

1. Mempersiapkan surat-surat pengantar, surat jalan, photo copy SPMK dsb
2. Pengumpulan data sekunder berupa data Sekolah, jumlah siswa dan guru serta fasilitas pendukung yang dimiliki sekolah
3. Persiapan Personil pelaksanaan, meliputi :
 - Penjelasan spesifikasi teknis pekerjaan lapangan
 - Asuransi kecelakaan
4. Peralatan Meliputi :
 - Mengasuransikan peralatan lapangan.
 - Menyiapkan peralatan untuk Survey Pendahuluan.

3.1.2 Survey Pendahuluan

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan survey pendahuluan ini adalah :

1. Untuk mendapatkan informasi awal mengenai lokasi sekolah, fasilitas existing, kegiatan sekolah, kondisi lingkungan, potensi daerah hinterland dan rencana pengembangan.
2. Memberikan gambaran potensi daerah dan manfaat pembangunan fasilitas sekolah.

Survey dipimpin oleh Team Leader yang dibantu oleh fasilitator dan didampingi oleh Direksi Pekerjaan maupun kepala sekolah. Sebelum team memulai kegiatan lapangan, Team Leader terlebih dahulu melaporkan tentang penugasan ke Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah dan Kepala Sekolah setempat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam pelaksanaan survey pendahuluan yakni pengamatan lokasi, untuk mengetahui:

1. Layak atau tidaknya lokasi tersebut dibangun dan dikembangkan bila ditinjau dari aspek teknis, operasional, keselamatan pelayaran, sosial, ekonomi dan manfaat.
2. Seberapa luas area yang dapat dikembangkan baik secara topografi dan hasil pengukuran lahan yang dimiliki sekolah.
3. Kondisi lingkungan, antara lain menyangkut keberadaan daerah konservasi (daerah lingkungan) baik perairan, daratan (hutan lindung, hutan bakau), sosial, dan lain-lain di lokasi pelabuhan dan sekitarnya.
4. Pengumpulan data-data sekunder meliputi data-data kondisi pelabuhan (teknis maupun operasional), ekonomi, kondisi jaringan transportasi, demografi, meteorologi (lokasi terdekat) dan Rencana Umum Tata Ruang (dari Pemerintah Kabupaten Seruyan dan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah). Dalam perencanaan pengembangan pelabuhan agar dilengkapi dengan alternatif.

3.2. POLA PENDAMPINGAN PROGRAM REVITALISASI SEKOLAH

Kegiatan pendampingan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan oleh perguruan tinggi dilaksanakan dengan pendekatan sistematis dan berbasis siklus manajemen proyek, yang mencakup tahapan: persiapan, pelaksanaan pemantauan, analisis data, serta pelaporan dan evaluasi. Adapun metodologi pelaksanaan kegiatan ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Persiapan Kegiatan

Tahapan awal ini bertujuan untuk memastikan kesiapan tim pendamping dalam menjalankan tugas di lapangan. Kegiatan meliputi:

- a. Pembentukan tim pelaksana dan penunjukan personel sesuai kompetensi.
- b. Penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan.
- c. Koordinasi awal dengan Direktorat SMA dan satuan pendidikan sasaran.
- d. Pengumpulan dan studi dokumen perencanaan (gambar teknis, RAB, kontrak, dan dokumen perizinan).

e. Penyusunan instrumen pemantauan, format laporan, dan checklist lapangan.

2. Pelaksanaan Pemantauan Lapangan

Tahap ini merupakan kegiatan utama, dilaksanakan secara langsung ke lokasi satuan pendidikan yang menjalankan revitalisasi. Fokus utamanya mencakup:

- a. Pemantauan Perencanaan: Verifikasi kesesuaian antara rencana teknis (desain, gambar, RAB) dengan kondisi riil.
- b. Pemantauan Pelaksanaan Konstruksi: Observasi teknis terhadap mutu material, metode pelaksanaan, keselamatan kerja (K3), serta progres fisik di lapangan.
- c. Pemantauan Pengadaan Perabot: Reviu kesesuaian jumlah, mutu, dan waktu pengadaan dengan ketentuan.
- d. Dokumentasi Lapangan: Pengambilan data berupa catatan, foto, video, dan hasil wawancara jika diperlukan.

3. Analisis dan Reviu Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis untuk mengidentifikasi potensi permasalahan serta memastikan kesesuaian pelaksanaan program terhadap rencana yang telah disetujui. Kegiatan ini meliputi:

- a. Reviu konsistensi dokumen (RAB, kontrak, berita acara, laporan kemajuan) dengan hasil di lapangan.
- b. Penyusunan ringkasan permasalahan dan potensi risiko teknis maupun administratif.
- c. Pemberian rekomendasi kepada satuan pendidikan untuk langkah korektif.

4. Pelaporan dan Koordinasi

Tahap akhir kegiatan ini mencakup penyusunan laporan pendampingan dan pelaporan hasil ke berbagai pemangku kepentingan. Rincian kegiatannya:

- a. Penyusunan laporan hasil pemantauan per lokasi satuan pendidikan.
- b. Penyampaian laporan kepada Direktorat SMA dan pihak sekolah terkait.
- c. Presentasi hasil evaluasi dan rekomendasi.
- d. Dokumentasi hasil evaluasi keseluruhan sebagai umpan balik untuk

pelaksanaan pendampingan tahap berikutnya.

5. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas pendampingan, baik dari sisi teknis maupun administratif. Evaluasi ini juga menjadi dasar untuk perbaikan metode kerja di masa depan. Bentuk kegiatan evaluasi antara lain:

- a. Diskusi internal tim perguruan tinggi.
- b. Evaluasi bersama Direktorat SMA dan Dinas Pendidikan.
- c. Pengumpulan umpan balik dari satuan pendidikan sasaran.

3.3. PENGENDALIAN MUTU HASIL PEKERJAAN.

Banyak cara melakukan hal ini yang meliputi penggunaan penjadwalan yang tepat hingga pengolahan data pembiayaan sehingga tidak mengakibatkan keterlambatan kemajuan pekerjaan dan mengusahakan pekerjaan tambah kurang seminimal mungkin. selain itu menjamin prosedur pelaksanaan konstruksi yang efisien dilaksanakan dan diikuti. cara lain yang mungkin dalam pengendalian biaya mutu hasil pekerjaan adalah

1. Meminimalkan biaya operasi lapangan
2. Menyiapkan sertifikat/ dokumen pembayaran secara teliti dan meyakinkan sesuai dengan capaian pekerjaan
3. Menyiapkan perkiraan pekerjaan sisa secara berkala sehingga jadwal pembayaran bias berdasarkan kemajuan pekerjaan yang ditaksir,
4. Menjamin bahwa pekerjaan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan spesifikasi.
5. Pemeriksaan Jumlah Material Sisa dan Perkiraan Biaya Secara Berkala.
6. Pengendalian Keselamatan dan kesehatan kerja.

3.4. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi (Monev) proyek adalah proses sistematis untuk mengamati dan menilai kemajuan serta kinerja proyek, guna memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Monitoring berfokus pada

pengumpulan data dan informasi secara berkelanjutan, sementara evaluasi bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan, efektivitas, dan efisiensi proyek.

1. Monitoring Proyek

Monitoring adalah proses pengumpulan data dan informasi secara terus-menerus untuk melacak kemajuan proyek. Tujuannya adalah untuk:

- a. Memastikan proyek berjalan sesuai rencana (jadwal, anggaran, ruang lingkup).
- b. Mengidentifikasi masalah atau penyimpangan sejak dini.
- c. Mendapatkan umpan balik untuk perbaikan.
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Monitoring melibatkan berbagai kegiatan, seperti:
 - a. Mengumpulkan data tentang kemajuan proyek (misalnya, laporan kemajuan, data kinerja).
 - b. Membandingkan data dengan rencana proyek.
 - c. Mengidentifikasi masalah atau penyimpangan (misalnya, keterlambatan, kekurangan anggaran, masalah kualitas).
 - d. Melaporkan kemajuan dan masalah kepada pihak yang berkepentingan.

2. Evaluasi Proyek

Evaluasi adalah proses sistematis untuk menilai pencapaian tujuan, efektivitas, dan efisiensi proyek. Tujuannya adalah untuk:

- a. Menilai apakah proyek mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Menilai efektivitas proyek dalam mencapai hasil yang diinginkan.
- c. Menilai efisiensi proyek dalam penggunaan sumber daya.
- d. Mengidentifikasi pelajaran yang dapat dipetik untuk proyek di masa depan.

Evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahap proyek, seperti:

- a. Evaluasi awal (ex-ante) untuk menilai kelayakan proyek.
- b. Evaluasi tengah (mid-term) untuk menilai kemajuan proyek.
- c. Evaluasi akhir (ex-post) untuk menilai pencapaian tujuan dan efektivitas

proyek.

3. Manfaat Monev Proyek

Meningkatkan peluang keberhasilan proyek, Membantu pengambilan keputusan yang tepat, Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, Memberikan pembelajaran untuk proyek di masa depan.

BAB IV

PELAKSANAAN KERJA

4.1 TENAGA PENDAMPING

Berdasarkan Perubahan adendum perubahan jumlah satuan pendidikan yang menerima dana bantuan melalui revitalisasi, berdampak dengan penugasan/tenaga pendamping sehingga menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pendampingan, tim pelaksana dibentuk dengan struktur dan kompetensi tenaga yang sesuai dengan pelaksanaan pendmpingan pada program Revtaslisasi Satuan Pendidikan Swakelola Type III. Adapun tenaga pendamping terdiri dari:

1. Ketua Tim Pelaksana Swakelola, adalah seorang Sarjana (S2) Teknik Sipil, memiliki pengalaman dalam bidang perencanaan maupun pengawasan bangunan sipil dengan kualifikasi pengalaman bekerja dalam bidang tersebut lebih dari 5 (lima) tahun, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan linimasa kerja kegiatan Pemantauan Program Revitalisasi Sekolah Menengah Atas;
 - b. Memimpin/mengoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap kinerja seluruh tim;
 - c. Bertanggung jawab dalam koordinasi penyusunan materi presentasi Sosialisasi (presentation materials) dan instrumen monitoring (monitoring instruments) yang akan dipakai dalam kegiatan Pendampingan;
 - d. menetapkan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan Tim Pelaksana Swakelola, pembinaan teknis dan hasil pelaksanaan pendampingan di seluruh wilayah pekerjaannya;
 - e. memastikan pekerjaan seluruh Tim Pelaksana Swakelola berjalan sesuai dengan linimasa kerja, termasuk pemecahan masalah Sekolah Menengah Atas dalam pelaksanaan program ini; dan
 - f. Penempatan Di Provinsi dan monitoring seluruh sekolah.

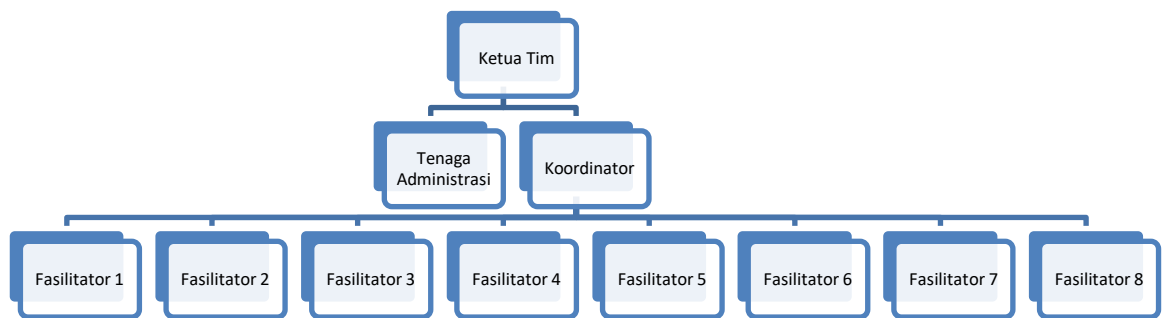
2. Koordinator Tim Pelaksana Swakelola, adalah seorang Sarjana (S2) Teknik Sipil, memiliki pengalaman dalam bidang perencanaan maupun pengawasan bangunan sipil dengan kualifikasi pengalaman bekerja dalam bidang tersebut lebih dari 3 (tiga) tahun, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Mengoordinasikan penugasan Fasilitator, masing-masing koordinator akan mengoordinasikan 1 s.d. 7 Fasilitator;
 - b. Memberikan pendampingan dalam pelaksanaan pemantauan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan kepada fasilitator;
 - c. Membantu fasilitator dalam mereviu gambar rencana kerja, rencana anggaran biaya, serta rencana kerja dan syarat-syarat yang disusun oleh Tim Teknis P2SP, termasuk perubahannya, dan menyampaikan hasil reviu kepada PPK;
 - d. Memvalidasi hasil verifikasi progres dan laporan, kesesuaian antara pelaksanaan dan panduan, serta penyelesaian 100% pekerjaan Satuan Pendidikan yang disampaikan oleh Fasilitator;
 - e. Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan yang ada di Satuan Pendidikan dalam hal Fasilitator tidak dapat memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang ada di lapangan;
 - f. Memantau kemajuan pelaksanaan program dan menyampaikan laporan berkala (bulanan) kepada PPK;
 - g. Melakukan supervisi lapangan terhadap pencapaian progres revitalisasi, jika diperlukan;
3. Fasilitator Pelaksana Swakelola, adalah seorang Sarjana (S1) Teknik Sipil, memiliki pengalaman dalam bidang perencanaan maupun pengawasan bangunan sipil dengan kualifikasi pengalaman bekerja dalam bidang tersebut lebih dari 3 (tiga) tahun, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. Mereviu gambar rencana kerja, rencana anggaran biaya, serta rencana kerja dan syarat- syarat yang disusun oleh Tim Teknis P2SP, termasuk perubahannya;
 2. Meminta laporan kemajuan mingguan kepada pengawas yang ditunjuk oleh

P2SP;

3. Melakukan kunjungan lapangan atas laporan kemajuan pekerjaan 30% dan/atau setelah 30 hari kalender setelah dana diterima oleh sekolah
 - 1) Memeriksa material on site
 - 2) Memeriksa tenaga kerja
 - 3) Mencatat kendala di lapangan;
 4. Melakukan kunjungan lapangan untuk memeriksa laporan kemajuan pekerjaan 50% (saat pencairan sisa 30%)
 - 1) Memastikan kondisi lapangan sesuai dengan Progres 50%
 - 2) Memeriksa material on site
 - 3) Memeriksa tenaga kerja
 - 4) Mencatat kendala di lapangan;
 5. Memverifikasi progres dan laporan pelaksanaan pekerjaan untuk pencairan Tahap II;
 6. Memeriksa laporan kemajuan sebelum pekerjaan mencapai 100% (sebelum serah terima);
 7. Memeriksa kesesuaian antara pelaksanaan program revitalisasi di Sekolah Menengah Atas dengan panduan pelaksanaan;
 8. Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan yang ada di Sekolah Menengah Atas;
 9. Memantau kemajuan pelaksanaan program dan menyampaikan laporan berkala (mingguan) kepada Koordinator; dan
-
10. Penempatan fasilitator sebagai berikut:
 - 1) Kab. Barito Selatan dan Kab. Barito Timur 1 orang;
 - 2) Kota Palangka Raya dan Kab. Pulang Pisau 1 orang;
 - 3) Kab. Kotawaringin Timur dan Kab. Katingan 1 orang;
 - 4) Kab. Sukamara 1 orang;
 - 5) Kab. Lamandau 1 orang;
 - 6) Kab. Murung Raya dan Kab. Barito Utara 1 orang;
 - 7) Kab. Kapuas 1 orang;

8) Kab. Katingan dan Kab. Gunung Mas 1 orang;

4. Tenaga Administrasi, adalah seorang Sarjana (S1) Teknik Sipil, memiliki pengalaman dalam bidang perencanaan maupun pengawasan bangunan sipil dengan kualifikasi pengalaman bekerja dalam bidang tersebut lebih dari 1 (satu) tahun, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- Mengumpulkan dan mengarsipkan seluruh dokumen resmi seperti; dan
 - Membantu menyiapkan laporan berkala dan akhir yang meliputi.
 - Menjadi operator dalam penyusunan digitalisasi pelaporan dan data hasil pekerjaan.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pendampingan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah

4.2 JADWAL PENUGASAN PERSONIL

Tabel 4.1 Pelaksanaan Jadwal Penggunaan Personel

No	Jabatan	Bulan				
		Agust.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
1	Ketua Tim Prov. Kalimantan Tengah Ir. Norseta Ajie Saputra, ST., MT.					
2	Kordinator Prov. Kalimantan Tengah Ir. Hendra Putra Jaya, ST., MT.					
3	Fasilitator 1 Kab. Barito Selatan dan Kab. Barito Timur Ir. Reza Zulfikar Akbar, ST., M.Sc.					
4	Fasilitator 2 Kab. Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya Ir. Noviyanty Handayani, ST., MT., IPM					
5	Fasilitator 3 Kab. Kotawaringin Timur dan Kab. Katingan Ir. Rizkan Maulidi Ansyari, ST., MT., IPM					
6	Fasilitator 4 Kab. Sukamara Ir. Amelia Faradila, ST., MT.					

7	Fasilitator 5 Kab. Lamandau Ir. Rida Respati, ST., MT.					
8	Fasilitator 6 Kab. Murung Raya dan Kab. Barito Utara Ir. Nirwana Puspasari, ST., MT.					
9	Fasilitator 7 Kab. Kapuas Ir. Ryco Prawira Purba, ST., MT					
10	Fasilitator 8 Kab. Katingan Ir. Rudy Yoga Lesmana, ST.,M.Si					
11	Tenaga Administrasi Octafiana Indah Rohani ST					

4.3 PELAKSANAAN PENDAMPINGAN

Dalam pelaksanaan pendampingan dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Catatan Pelaksanaan Pendampingan Bulan Oktober

No	Nama Sekolah	Uraian	Permasalahan	Rekomendasi
Fasilitator 7 Kab. Kapuas → Ir. Ryco Prawira Purba, ST., MT				
1	SMA Negeri 1 Tamban Catur	• Proposal pada SIMASPRAS perlu perbaikan • Progres Pekerjaan Realisasi 53,65%, Rencana 53,65% dan Deviasi 0,0% → Sesuai • Pembangunan Toilet sudah 100% dan Pembangunan ruang osis pekerjaan pondasi dan struktural • Rencana pekerjaan bulan november pekerjaan atap dan dinding untuk ruang Osis	• Proposal SIMASPRAS perlu perbaikan	• Segera memperbaiki Proposal usulan
2	SMAN 3 Kuala Kapuas	• Proposal pada SIMASPRAS perlu perbaikan • Progres Pekerjaan Realisasi	• Proposal SIMASPRAS perlu perbaikan • Pastikan tidak ada	• Segera memperbaiki Proposal usulan • RPD tidak boleh berubah

No	Nama Sekolah	Uraian	Permasalahan	Rekomendasi
		69,67%, Rencana 64,88% dan Deviasi 4,79% ➔ Lebih Cepat • Rehabilitas ruang kelas 80% • Pekerjaan bulan depan memulai pekerjaan rehabilitas perpustakaan dan rehabilitas ruang ibadah	perubahan RPD	
3	SMA Negeri Mantangai	• Proposal pada SIMASPRAS perlu perbaikan • Progres Pekerjaan Realisasi 15,85%, Rencana 20,73% dan Deviasi -4,9% ➔ Terlambat • Rehabilitasi ruang kelas perkiraan sudah 50%, ruang BK 90% dan toilet belum dikerjakan	• Proposal SIMASPRAS perlu perbaikan • Pastikan tidak ada perubahan RPD • Berpotensi ada adendum penyesuaian	• Segera memperbaiki Proposal usulan • RPD tidak boleh berubah • Segera perubahan agar dibuat BA adendum dan diketahui oleh fasilitator

No	Nama Sekolah	Uraian	Permasalahan	Rekomendasi
		Target bulan november penyelesain rehab ruang kelas dan ruang BK		
4	SMAN 1 Kapuas Murung	- Proposal pada SIMASPRAS perlu perbaikan - Progres Pekerjaan Realisasi 66,00%, Rencana 33,80% dan Deviasi 32,2% → Lebih Cepat - Pekerjaan bulan ini - Pekerjaan pembangunan ruang administrasi dan ruang BK yaitu pekerjaan beton bertulang dan dinding - Pekerjaan rehabilitasi lab, IPA perbaikan beton	- Proposal SIMASPRAS perlu perbaikan - Pastikan tidak ada perubahan RPD	- Segera memperbaiki Proposal usulan - RPD tidak boleh berubah

No	Nama Sekolah	Uraian	Permasalahan	Rekomendasi
		bertulang - Rencana pekerjaan bulan november - Pekerjaan pembangunan ruang administrasi dan ruang BK yaitu penyelesaian pekerjaan dinding, atap dan plafond - Pekerjaan rehabilitasi lab, IPA perbaikan atap, plafond dan lantai		
5	SMAN 1 Pulau Petak	- Proposal pada SIMASPRAS perlu perbaikan - Progres Pekerjaan Realisasi 46,68%, Rencana 45,53% dan Deviasi 1,2% ➔ Lebih Cepat - Pekerjaan bulan ini untuk	- Proposal SIMASPRAS perlu perbaikan - Pastikan tidak ada perubahan RPD	- Segera memperbaiki Proposal usulan - RPD tidak boleh berubah

No	Nama Sekolah	Uraian	Permasalahan	Rekomendasi
		rehabilitasi fokus pada penyelesaian rehabilitasi struktur. Sedangkan untuk pembangunan penyelesaian beton bertulang dan dinding • Target bulan november, untuk rehabilitasi dan pembangunan penyelesaian perbaikan struktural dan memulai pekerjaan arsitektural		

Tabel 4.3 Catatan Pelaksanaan Pendampingan Bulan November

No	Nama Sekolah	Uraian	Permasalahan	Rekomendasi
Fasilitator 7 Kab. Kapuas → Ir. Ryco Prawira Purba, ST., MT				
1	SMA Negeri 1 Tamban Catur	• SIMASPRAS perlu perbaikan • Progres Pekerjaan Realisasi 87,7%, Rencana 87,7% dan Deviasi 0,0% → Sesuai • Rencana pekerjaan bulan ini pekerjaan atap dan dinding. • Selesai desember 100%	• SIMASPRAS belum diperbaiki	• Segera perbaiki Laporan 50%
2	SMAN 3 Kuala Kapuas	• SIMASPRAS perlu perbaikan • Progres Pekerjaan Realisasi 90,73%, Rencana 90,73% dan Deviasi 0,0% → Sesuai	• SIMASPRAS belum diperbaiki	• Segera perbaiki Laporan 50%

No	Nama Sekolah	Uraian	Permasalahan	Rekomendasi
		• Penyelesaian rehab ruang kelas 100% • Target bulan depan penyelesaian rehab perpusatakan dan rehab ruang ibadah		
3	SMA Negeri Mantangai	• SIMASPRAS perlu perbaikan • Progres Pekerjaan Realisasi 62,68%, Rencana 66,1% dan Deviasi -3,4% ➔ Terlambat • Pekerjaan bulan ini mulai rehab toilet • Bulan desember target 100% semua pekerjaan selesai	• SIMASPRAS belum diperbaiki • Keterlambatan dikarenakan akses jalan rusak dan menghambat material yang didatangkan dari kota	• Segera perbaiki Laporan 50% • Konsultan pengawas agar membuat action plan
4	SMAN 1 Kapuas Murung	• SIMASPRAS perlu perbaikan • Progres Pekerjaan Realisasi 66,24%, Rencana 82,12 %	• SIMASPRAS belum diperbaiki • Keterlambatan cukup	• Segera perbaiki Laporan 50% • Lakukan percepatan

No	Nama Sekolah	Uraian	Permasalahan	Rekomendasi
		dan Deviasi -15,9% ➔ Terlambat - pekerjaan bulan ini - Pekerjaan pembangunan ruang administrasi dan ruang BK yaitu penyelesaian pekerjaan dinding, atap dan plafond - Pekerjaan rehabilitasi lab, IPA perbaikan atap, plafond dan lantai - Target selesai 100% pada desember	tinggi dikarenakan pekerja kurang dan material tidak on site	penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal perencanaan yang sudah disepakati.
5	SMAN 1 Pulau Petak	- SIMASPRAS perlu perbaikan - Progres Pekerjaan Realisasi 65,04%, Rencana 57,56% dan Deviasi 7,5% ➔ Lebih Cepat	SIMASPRAS belum diperbaiki	Segera perbaiki Laporan 50%

No	Nama Sekolah	Uraian	Permasalahan	Rekomendasi
		• Pekerjaan bulan untuk rehabilitasi dan pembangunan mulai pekerjaan arsitektural seperti dinding plafond dan keramik • Target selesai 100% desember		

Tabel 4.4 Catatan Pelaksanaan Pendampingan Bulan Desember

No	Nama Sekolah	Uraian	Permasalahan	Rekomendasi
Fasilitator 7 Kab. Kapuas → Ir. Ryco Prawira Purba, ST., MT				
1	SMA Negeri 1 Tamban Catur	- Progres Pekerjaan Realisasi 100,00%, Rencana 100,00% dan Deviasi 0,00% → Selesai - Pekerjaan Selesai - Laporan Progres 50% Selesai	- Pencairan 100% minggu ke 2 bulan desember - Laporan Akhir 100% Belum Diperbaiki	- Diperlukan koordinasi awal untuk mengantisipasi keterlambatan pencairan dana. - Diperlukan percepatan dan penertiban penyusunan laporan progres dan akhir pada sekolah yang belum menindaklanjuti hasil

No	Nama Sekolah	Uraian	Permasalahan	Rekomendasi
				review di SIMASPRAS.
2	SMAN 3 Kuala Kapuas	- Progres Pekerjaan Realisasi 100,00%, Rencana 100,00% dan Deviasi 0,00% ➔ Selesai - Pekerjaan Selesai - Laporan Progres 50% Selesai	- Pencairan 100% minggu ke 2 bulan desember - Laporan Akhir 100% Belum Diperbaiki	- Diperlukan koordinasi awal untuk mengantisipasi keterlambatan pencairan dana. - Diperlukan percepatan dan penertiban penyusunan laporan progres dan akhir pada sekolah yang belum menindaklanjuti hasil review di SIMASPRAS.
3	SMA Negeri Mantangai	- Progres Pekerjaan Realisasi 100,00%, Rencana 100,00% dan Deviasi 0,00% ➔ Selesai - Pekerjaan Selesai	- Pencairan 100% minggu ke 2 bulan desember - Laporan Progres 50% Belum Diperbaiki - Laporan Akhir 100% Belum Diupload	- Diperlukan koordinasi awal untuk mengantisipasi keterlambatan pencairan dana. - Diperlukan percepatan dan penertiban penyusunan laporan progres dan akhir

No	Nama Sekolah	Uraian	Permasalahan	Rekomendasi
				pada sekolah yang belum menindaklanjuti hasil review di SIMASPRAS.
4	SMAN 1 Kapuas Murung	- Progres Pekerjaan Realisasi 100,00%, Rencana 100,00% dan Deviasi 0,00% ➔ Selesai - Pekerjaan Selesai - Laporan Progres 50% Selesai	- Pencairan 100% minggu ke 2 bulan desember - Laporan Akhir 100% Belum Diperbaiki	- Diperlukan koordinasi awal untuk mengantisipasi keterlambatan pencairan dana. - Diperlukan percepatan dan penertiban penyusunan laporan progres dan akhir pada sekolah yang belum menindaklanjuti hasil review di SIMASPRAS.
5	SMAN 1 Pulau Petak	- Progres Pekerjaan Realisasi 100,00%, Rencana 100,00% dan Deviasi 0,00% ➔ Selesai - Pekerjaan Selesai	- Pencairan 100% minggu ke 2 bulan desember - Laporan Progres 50% Belum Diperbaiki - Laporan Akhir 100%	- Diperlukan koordinasi awal untuk mengantisipasi keterlambatan pencairan dana. - Diperlukan percepatan dan

No	Nama Sekolah	Uraian	Permasalahan	Rekomendasi
			Belum Diupload	penertiban penyusunan laporan progres dan akhir pada sekolah yang belum menindaklanjuti hasil review di SIMASPRAS.

Tabel 4.5 Rekapitulasi Simaspras

No	Nama Sekolah	Dokumen PKS	Laporan Pemeriksaan Fasilitator	Proposal Hasil Review	Laporan Progres 50%	Laporan Akhir	BAST Penyelesaian Pekerjaan	Surat Pemberitahuan Penyelesaian Lewat Tahun
Fasilitator 7 Kab. Kapuas → Ir. Ryco Prawira Purba, ST., MT								
1	SMA Negeri 1 Tamban Catur	Tervalidasi	Belum Direview Pusat	Tervalidasi	Tervalidasi	Tervalidasi	Tervalidasi	Tidak Perlu
2	SMAN 3 Kuala	Tervalidasi	Belum	Tervalidasi	Tervalidasi	Tervalidasi	Tervalidasi	Tidak Perlu

No	Nama Sekolah	Dokumen PKS	Laporan Pemeriksaan Fasilitator	Proposal Hasil Review	Laporan Progres 50%	Laporan Akhir	BAST Penyelesaian Pekerjaan	Surat Pemberitahuan Penyelesaian Lewat Tahun
	Kapuas		Direview Pusat					
3	SMA Negeri Mantangai	Tervalidasi	Belum Direview Pusat	Tervalidasi	Tervalidasi	Tervalidasi	Tervalidasi	Tidak Perlu
4	SMAN 1 Kapuas Murung	Tervalidasi	Tervalidasi	Tervalidasi	Tervalidasi	Tervalidasi	Tervalidasi	Tidak Perlu
5	SMAN 1 Pulau Petak	Tervalidasi	Belum Direview Pusat	Tervalidasi	Tervalidasi	Tervalidasi	Tervalidasi	Tidak Perlu

Berdasarkan Tabel 4.5 Rekapitulasi SIMASPRAS, secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sekolah dampingan pada fasilitator telah berhasil menyelesaikan dan memvalidasi dokumen awal, khususnya Dokumen PKS dan Proposal Hasil Review, yang mayoritas berstatus tervalidasi. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan awal, sekolah relatif mampu memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.

Namun demikian, pada tahapan lanjutan masih ditemukan berbagai kendala yang cukup signifikan. Hampir seluruh sekolah menunjukkan status “Belum Direview Pusat” pada Laporan Pemeriksaan Fasilitator, yang mengindikasikan adanya keterlambatan proses verifikasi di tingkat pusat. Kondisi ini berpotensi menghambat percepatan tahapan administrasi berikutnya, khususnya penyusunan laporan akhir dan penyelesaian administrasi pekerjaan.

Pada aspek Laporan Progres 50%, meskipun sebagian sekolah telah tervalidasi, masih banyak yang berada pada status “Menunggu Perbaikan”. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan kelengkapan laporan progres belum sepenuhnya memenuhi standar teknis dan administratif yang dipersyaratkan, sehingga memerlukan tindak lanjut dan pendampingan lebih intensif dari fasilitator.

Selanjutnya, pada Laporan Akhir dan BAST Penyelesaian Pekerjaan, sebagian besar sekolah masih berada pada status “Belum Upload” atau “Menunggu Perbaikan”. Kondisi ini mencerminkan bahwa penyelesaian pekerjaan fisik dan administrasi belum sepenuhnya selesai, serta adanya keterlambatan dalam penyiapan dan pengunggahan dokumen akhir. Faktor keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan pencairan dana, serta perbedaan kapasitas administrasi antar sekolah diduga menjadi penyebab utama kondisi tersebut.

Adapun terkait Surat Pemberitahuan Penyelesaian Lewat Tahun, sebagian besar sekolah tidak memerlukannya, namun masih terdapat beberapa sekolah yang belum mengunggah dokumen tersebut meskipun statusnya diperlukan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman sekolah terhadap kewajiban administrasi akhir tahun anggaran.

Secara keseluruhan, rekapitulasi ini menggambarkan bahwa tahapan awal program berjalan relatif baik, namun tahapan akhir masih membutuhkan percepatan, penertiban, dan penguatan koordinasi antara sekolah, fasilitator, dan pihak pusat agar

seluruh dokumen dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan SIMASPRAS.

Tabel 4.8 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Simaspras Kabupaten Kapuas

Jenis Temuan	Jumlah Sekolah	Presentase (%)	Keterangan
Laporan Progres 50% Selesai	5	100	Selesai
Laporan Akhir 100% Selesai	5	100	Selesai
Laporan Progres 50% Belum Diperbaiki	5	100	Selesai
Laporan Akhir 100% Belum Diperbaiki	5	100	Selesai
Laporan Akhir 100% Belum Diupload	5	100	Selesai

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen teknis terhadap 44 sekolah penerima program, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.5, dapat diketahui bahwa tingkat pemenuhan dokumen teknis masih menunjukkan ketimpangan antara penyelesaian laporan progres dan laporan akhir. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar sekolah telah mampu melaksanakan kewajiban pelaporan pada tahap menengah, namun masih mengalami kendala signifikan dalam penyelesaian dokumen pada tahap akhir kegiatan.

Pada komponen Laporan Progres 50%, tercatat sebanyak 37 sekolah atau 84,09% telah menyelesaikan laporan sesuai ketentuan. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum sekolah telah memahami alur pelaporan dan mampu menyusun laporan perkembangan pekerjaan pada tahap pelaksanaan. Penyelesaian laporan progres ini juga mengindikasikan bahwa kegiatan fisik di lapangan pada umumnya telah berjalan dan terdokumentasi. Meskipun demikian, masih terdapat 7 sekolah atau 15,91% yang Laporan Progres 50%-nya belum diperbaiki berdasarkan hasil review teknis. Hal ini menandakan bahwa kualitas dan kesesuaian isi laporan masih belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga memerlukan perbaikan lanjutan.

Lebih lanjut, pada aspek Laporan Akhir 100%, hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang jauh lebih memprihatinkan. Dari seluruh sekolah yang diperiksa, hanya 2 sekolah atau 4,55% yang telah menyelesaikan Laporan Akhir 100% secara lengkap dan sesuai ketentuan. Rendahnya angka ini menunjukkan bahwa tahap pelaporan akhir merupakan titik kritis (critical point) dalam pemenuhan dokumen teknis SIMASPRAS.

Sebagian besar sekolah, yaitu 37 sekolah atau 84,09%, masih berada pada status Laporan Akhir 100% belum diperbaiki, yang berarti laporan akhir telah disusun namun belum menindaklanjuti catatan hasil pemeriksaan teknis. Kondisi ini mengindikasikan adanya keterbatasan dalam pemahaman substansi laporan akhir, ketidaksesuaian data pendukung, atau belum optimalnya pendampingan dalam proses penyempurnaan dokumen. Selain itu, ditemukan pula 6 sekolah atau 13,64% yang belum mengunggah Laporan Akhir 100% sama sekali, yang menunjukkan keterlambatan baik dari sisi administratif maupun teknis.

Secara keseluruhan, temuan pemeriksaan dokumen teknis ini menegaskan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada penyusunan Laporan Progres 50%, melainkan pada penyelesaian dan penyempurnaan Laporan Akhir 100%. Kondisi tersebut berpotensi berdampak pada keterlambatan proses verifikasi, penilaian kinerja program, serta penyelesaian administrasi kegiatan secara keseluruhan.

BAB V

REKOMENDASI DAN SARAN

5.1 REKOMENDASI DAN SARAN

Tim Revitalisasi Pendampingan Sekolah telah melaksanakan pendampingan tahap 2 dan 3, pada 44 sekolah yang mendapatkan program revitalisasi ini. Adapun Rekomendasi dan Saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pendampingan oleh Perguruan Tinggi dalam Program Revitalisasi

a. Penguatan Sosialisasi dan Pemahaman Program

Perlu dilakukan sosialisasi lanjutan secara berkala kepada Perguruan Tinggi dan satuan pendidikan untuk memperkuat pemahaman terkait mekanisme Swakelola, lingkup pekerjaan, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.

b. Peningkatan Pemahaman Kontrak Swakelola

Disarankan adanya penjelasan teknis lebih detail mengenai Kontrak Swakelola, khususnya terkait hak dan kewajiban, alur pelaksanaan, serta konsekuensi administrasi agar tidak terjadi perbedaan penafsiran di lapangan.

c. Penguatan Kapasitas Sumber Daya

Perguruan Tinggi perlu memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan kompeten, baik dari sisi teknis maupun administrasi, guna mendukung kelancaran pendampingan satuan pendidikan.

d. Optimalisasi Pengelolaan Waktu Pelaksanaan

Diperlukan perencanaan jadwal pendampingan yang lebih realistis dan fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, agar pelaksanaan Kontrak Swakelola dapat berjalan efektif dan tepat waktu.

e. Peningkatan Koordinasi dengan BBPMP/BPMP

Koordinasi antara Perguruan Tinggi dan BBPMP/BPMP perlu ditingkatkan melalui komunikasi rutin dan forum koordinasi, sehingga pelaksanaan pendampingan dan pengawasan berjalan selaras.

f. Penguatan Peran dalam Proses Verifikasi dan Validasi Dokumen

Keterlibatan Perguruan Tinggi dalam proses verifikasi dan validasi dokumen perlu

dioptimalkan untuk memastikan kesesuaian dokumen teknis dan administrasi dengan ketentuan yang berlaku.

g. Standarisasi Mekanisme Pendampingan

Disarankan penyusunan panduan operasional atau standar kerja pendampingan agar pelaksanaan di setiap wilayah memiliki keseragaman kualitas dan metode.

2. Pelaksanaan Pendampingan oleh Perguruan Tinggi di Satuan Pendidikan

a. Penguatan Pembekalan Awal Program

Perlu dilakukan pembekalan awal yang lebih terstruktur dan merata kepada Perguruan Tinggi serta BBPMP/BPMP terkait kebijakan, mekanisme, dan alur Program Revitalisasi Satuan Pendidikan agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama sejak awal pelaksanaan.

b. Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi dalam Reviu Dokumen

Keterlibatan Perguruan Tinggi dalam mereviu dokumen kelengkapan perlu diperkuat melalui kejelasan kewenangan dan batasan peran, sehingga proses verifikasi dokumen berjalan lebih efektif dan konsisten.

c. Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak

Diperlukan penegasan kembali tugas dan tanggung jawab Perguruan Tinggi, BBPMP/BPMP, serta pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk pedoman teknis atau surat penugasan untuk meminimalkan tumpang tindih peran.

d. Penyusunan dan Standarisasi Rencana Kerja Pendampingan

Perguruan Tinggi disarankan menyusun rencana kerja pendampingan yang terukur, dilengkapi indikator target dan tujuan yang jelas, serta disepakati bersama Direktorat SMA sebagai acuan pelaksanaan di lapangan.

e. Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Antar Pihak

Koordinasi antara Perguruan Tinggi, Tim TA Pusat, Dinas Pendidikan Provinsi, BBPMP/BPMP, dan satuan pendidikan perlu ditingkatkan melalui pertemuan rutin, baik pada tahap awal, evaluasi pelaksanaan, maupun tahap akhir kegiatan.

f. Penguatan Mitigasi Risiko Pelaksanaan Program

Perguruan Tinggi perlu menyusun strategi mitigasi risiko secara sistematis, termasuk risiko teknis, administratif, keterbatasan waktu, serta kendala komunikasi dengan tim teknis satuan pendidikan.

- g. Dukungan terhadap Inovasi dan Akselerasi Pelaksanaan
Perlu diberikan ruang dan dukungan terhadap inovasi yang dilakukan Perguruan Tinggi dalam mempercepat pelaksanaan program revitalisasi, sepanjang tetap sesuai dengan ketentuan teknis dan regulasi yang berlaku.
 - h. Peningkatan Dukungan Administratif dan Sistem
Dukungan administrasi dari Direktorat SMA dan pemangku kepentingan lainnya perlu ditingkatkan, khususnya dalam ketepatan waktu pemenuhan kewajiban administrasi agar tidak berdampak pada proses pendampingan di lapangan.
 - i. Penguatan Sosialisasi dan Pendampingan Aplikasi SIMASPRAS
Sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SIMASPRAS perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mengurangi kendala teknis dan meningkatkan kualitas pelaporan.
 - j. Evaluasi Dampak Rekomendasi Perguruan Tinggi
Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap implementasi rekomendasi yang diberikan oleh Perguruan Tinggi guna memastikan rekomendasi tersebut benar-benar berdampak positif terhadap kualitas dan percepatan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan.
3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Satuan Pendidikan
- a. Penguatan Sosialisasi Tujuan dan Target Pendampingan
Perlu dilakukan sosialisasi ulang secara terstruktur kepada satuan pendidikan agar tujuan, target, dan output pendampingan dipahami secara seragam.
 - b. Penjadwalan Pendampingan yang Lebih Terkoordinasi
Jadwal dan mekanisme pendampingan perlu dituangkan secara tertulis dan disampaikan secara resmi kepada satuan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi, serta BBPMP/BPMP.
 - c. Penguatan Sistem Pengawasan Berlapis
Pengawasan pendampingan perlu diperkuat melalui sinergi antara Perguruan Tinggi, Dinas Pendidikan Provinsi, dan BBPMP/BPMP dengan pembagian peran yang jelas.
 - d. Pembentukan Tim Pengawas Kontrak Swakelola
Diperlukan tim khusus yang melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap

pelaksanaan Kontrak Swakelola agar kesesuaian dengan KAK dapat terjamin.

e. Standarisasi Mekanisme dan Teknis Pelaporan

Perlu penegasan dan penyederhanaan acuan pelaporan pendampingan (pendahuluan, mingguan, dan bulanan) guna mengurangi kendala administrasi.

f. Percepatan dan Kepastian Pencairan Kontrak Swakelola

Keterlambatan pencairan perlu diminimalkan melalui koordinasi lintas unit agar tidak menghambat pelaksanaan pendampingan.

g. Penguatan Dokumentasi Bukti Kegiatan

Perguruan Tinggi perlu memastikan seluruh aktivitas pendampingan terdokumentasi dengan baik sebagai bukti pelaksanaan dan bahan evaluasi.

h. Evaluasi Dampak Pendampingan Secara Berkala

Evaluasi dampak pendampingan perlu dilakukan secara periodik untuk memastikan kontribusi Perguruan Tinggi benar-benar meningkatkan keberhasilan program revitalisasi secara umum.

4. Masukan dan Rekomendasi untuk Program Pendampingan Swakelola

a. Persiapan Pelaksanaan Pendampingan

Perlu penguatan sosialisasi awal terkait tujuan, target, ruang lingkup, serta ketentuan Kontrak Swakelola agar dipahami seragam oleh seluruh satuan pendidikan dan tim pendamping.

b. Pelaksanaan Pendampingan di Satuan Pendidikan

Pendampingan perlu dilaksanakan secara terjadwal dan terdokumentasi dengan baik, mencakup aspek teknis, administrasi, serta pelaporan melalui SIMASPRAS sesuai ketentuan KAK.

c. Monitoring dan Evaluasi Pendampingan

Monitoring dan evaluasi perlu diperkuat melalui koordinasi rutin antara Perguruan Tinggi, Direktorat SMA, BBPMP/BPMP, dan Dinas Pendidikan Provinsi untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana.

d. Kendala Pelaksanaan Pendampingan

Kendala utama meliputi keterbatasan SDM satuan pendidikan, keterlambatan pencairan dana, serta belum optimalnya pemahaman teknis dan administrasi pelaporan.

e. Rekomendasi Perguruan Tinggi

Diperlukan penegasan mekanisme pendampingan dan pelaporan, peningkatan kapasitas satuan pendidikan, serta percepatan proses pencairan kontrak agar pendampingan lebih efektif dan berdampak pada keberhasilan program revitalisasi.

Daftar Pustaka

- Kurniawan, B. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Kemasyarakatan dalam Program Kemitraan Pemerintah*. Jurnal Tata Kelola Sektor Publik, 5(1), 22-35.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2020). *Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Tingkat Dasar*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan LKPP.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2021). *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola*. Jakarta: LKPP.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutedi, A. (2020). *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusriono, H. (2022). *Manajemen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Hubungan Kemitraan dengan Organisasi Kemasyarakatan*. Jurnal Administrasi Publik, 10(2), 145-158.

LAMPIRAN 1:

DOKUMENTASI KEGIATAN PENGABDIAN



PENDAMPINGAN LAPANGAN (SMAN 1 KAPUAS MURUNG)



PENDAMPINGAN LAPANGAN (SMAN 1 MANTANGAI)



PENDAMPINGAN LAPANGAN (SMAN 1 PULAU PETAK)



PENDAMPINGAN LAPANGAN (SMAN 1 TAMBAN CATUR)



PENDAMPINGAN LAPANGAN (SMAN 3 KAPUAS)

LAMPIRAN 2:

CAPAIAN DAN TARGET LUARAN

Luaran dan target capaian yang diinginkan dari pengabdian ini meliputi luaran wajib dan luaran tambahan. Yang di tunjukan pada table berikut:

No	Jenis Luaran	Skala	Tujuan	Capaian
1	Laporan Pengabdian Masyarakat	-	-	Collected
2	Dokumentasi Kegiatan	-	-	Proses
3	Artikel Ilmiah Pada Jurnal	-	-	Proses

LAMPIRAN 3:**RENCANA BIAYA KEGIATAN**

Biaya Pengabdian Masyarakat ini Sebesar Rp. 5.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total (Rp)
1	Konsumsi kegiatan (15 orang x 2 hari x 3 kali makan)	90	Porsi	25.000	1.500.000
2	Snack	2	Hari	300.000	600.000
3	Keperluan ATK	1	Ls	700.000	700.000
4	Dokumentasi Kegiatan (Foto & Video)	1	Ls	600.000	600.000
5	Keperluan Publikasi digital	1	Ls	800.000	800.000
6	Paket Internet / kuota tim pelaksanaan	1	Ls	400.000	400.000
7	Konsumsi rapat persiapan dan evaluasi	2	Kali	200.000	400.000
TOTAL					5.000.000